

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DI NEGARA KAWASAN PASIFIK SELATAN TERKAIT INTERNASIONALISASI SEPARATISME PAPUA GUNA MENJAGA KEDAULATAN INDONESIA

DEFENSE DIPLOMACY OF INDONESIA IN SOUTH PACIFIC COUNTRIES REGARDING TO THE INTERNATIONALIZATION OF PAPUA SEPARATISM ISSUE IN ACHIEVING THE SOVEREIGNTY OF INDONESIA

Felani Angela Rosalia Hematang¹, Rodon Pedrason², Bambang Wahyudi³
Universitas Pertahanan

Abstrak – Internasionalisasi separatisme Papua dimulai ketika masyarakat Papua yang menyuarakan kemerdekaan sebagai akibat dari isu pelanggaran HAM yang diklaim belum diselesaikan oleh Indonesia. Hal ini kemudian didukung dengan aktivis separatis yang mencari dukungan melalui negara-negara lain, dimana negara-negara Kawasan Pasifik Selatan merupakan aktor yang paling vokal dalam membawa isu pelanggaran HAM Papua pada sidang PBB. Di sisi lain, Indonesia melakukan segala cara untuk mempertahankan Papua sebagai perwujudan kedaulatan Indonesia sesuai dengan amanah kepentingan nasional Indonesia. Tentu saja pendekatan Indonesia dalam mengatasi isu internasionalisasi separatisme Papua tidak dapat dilakukan melalui konteks militer. Perkembangan isu separatisme yang telah diinternasionalisasikan menjadi konsiderasi Indonesia untuk mengembangkan strategi Indonesia dalam mempertahankan Papua. Konsep Diplomasi Pertahanan yang diterapkan Indonesia adalah sebagai strategi untuk mempertahankan Papua serta menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan.

Kata Kunci: Separatisme Papua, Internasionalisasi, Strategi Diplomasi Pertahanan

Abstract – *The internationalization of Papua separatism begins with the declaration of Independence as a reaction to unfinished solution for human rights violations in Papua. This issue is used by the Papuan to look for support from other countries, including in the South Pacific states that play the main role in promoting the human right violations issue at the United Nations Councils. On the other hand, Indonesia struggles in defending Papua as the implementation of sovereignty according to the national interest of Indonesia. Obviously, Indonesia's approach in handling the Papua separatism internationalization cannot be solved through military context. The development of separatism issue which had been internationalized become Indonesia's consideration to develop the strategy in defending Papua. Defense diplomacy concept which has been implemented by Indonesia as the strategy to defend Papua and also build the cooperation with South Pacific Countries.*

Keywords: *Internationalization, Defense Diplomacy Strategy*

¹ Program Studi Diplomasi Pertahanan cohort 4 Universitas Pertahanan, felani.hematang@gmail.com.

² Brigjen TNI Dr. Rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. adalah Kepala Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Dosen Program Studi Diplomasi Pertahanan Universitas Pertahanan.

³ Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.Si. adalah Sekretaris Program Studi Damai dan resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

PENDAHULUAN

Kedaulatan adalah target yang ingin dicapai setiap negara dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Pencapaian kedaulatan tersebut tidak terlepas dari dilematika perebutan wilayah yang akhirnya berkembang pada perjuangan mempertahankan konsep negara yang ideal. Konsep negara yang ideal untuk berdaulat adalah didukung oleh adanya warga negara, wilayah, serta diakui oleh negara lain.⁴

Pencapaian kedaulatan melalui peningkatan pertahanan negara tidak terlepas dari munculnya ancaman-ancaman yang mengganggu posisi kepentingan nasional suatu negara. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan bagi Indonesia yang memiliki tujuan sama seperti negara lainnya, yakni memiliki kedaulatan penuh. Sebaliknya, kedaulatan Indonesia belum sepenuhnya tercapai, terutama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Hal ini terbukti dengan adanya propaganda dalam merebut Irian Jaya yang saat itu masih berada pada kendali Belanda.

Usaha Indonesia dalam merebut Irian Jaya pada tahun 1963 dilakukan dengan sistem perang gerilya, yakni mengerahkan seluruh kapabilitas militer yang dimiliki Indonesia saat itu. Namun, hal ini tidak sepenuhnya menjamin Irian Jaya atau yang sekarang menjadi Papua untuk mengakui menjadi bagian dari NKRI.

Gerakan radikal yang dibentuk atas dasar prinsip ingin memerdekakan Papua dari Indonesia terjadi sejak tahun 1965. Hal ini sebagai akibat dari janji yang dilontarkan oleh Belanda pada saat itu, dan berpengaruh hingga pada ketidakpuasan terhadap PEPERA yang dibuat dimana ada oknum masyarakat Papua yang merasa tidak diikutsertakan dalam perumusan perjanjian tersebut. Benih-benih separatisme dipupuk dan dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal tahun 1950-an. Belanda saat itu bukan saja mempercepat pembangunan ekonomi dan administrasi di Irian Jaya, tetapi juga melakukan pembangunan politik⁵.

Menurut Nazarudin Syamsudin, upaya Belanda dalam rangka penanaman

⁴ Janice E. Thomson, *State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap Between Theory and Empirical Research*, (USA: Wiley, 1995), hlm. 32.

⁵ Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdaliling, *Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 110.

rasa anti-Indonesia di kalangan masyarakat Irian, yaitu Belanda menempuh tiga cara yaitu:⁶

1. Mengalihkan orientasi dari Indonesia pada wilayah Pasifik, meskipun sebelumnya Belanda telah ikut memperkuat orientasi Irian kepada Nusantara.
2. Berusaha mendekatkan Irian kepada Papua dan Nugini yang dikuasai Australia dengan harapan dapat menggabungkan semuanya dalam suatu negara.
3. Merencanakan suatu negara Papua setelah melalui suatu proses.
Dewan Nieuw Guinea yang didirikan oleh Belanda sebagai upaya untuk mendirikan negara boneka Papua, dapat dianggap sebagai “boom waktu” yang sengaja ditinggalkan oleh pemerintah Belanda di Irian Barat. Beberapa tokoh Irian yang pro-Belanda pada saat itu antara lain: Nicolaas Jouwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo, Nicolaas Tangahma, dan Elieser Jan Bonay.

⁶ Nazarudin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 108.

Isu separatisme Papua kemudian berkembang dan terdengar hingga pada ranah internasional mengundang respon dari kawasan Internasional, salah satunya negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi persamaan antara negara-negara kawasan Pasifik Selatan dan Papua, yakni dari posisi geografi hingga persamaan ras.

Papua yang merupakan daerah paling timur Indonesia, berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan bagian dari Pasifik Selatan. Tentu persamaan ras terjadi mengingat dominansi ras di Papua adalah dari melanesia. Selain itu, dari potensi geografis kawasan Pasifik Selatan merupakan satu dari sekian banyak kawasan yang membentuk organisasi regional sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman serta realisasi kerjasama diantara negara-negara anggota. Wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah yang cukup strategis dalam lingkungan politik Internasional, terlepas dari potensi sumber daya alamnya, negara-negara ini juga diklasifikasi oleh 3 budaya besar yaitu Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia.

Melanesia merupakan gugusan kepulauan yang memanjang dari Maluku lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia.

Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jenewa, Swiss yang berlangsung pada 29 Februari hingga 24 Maret 2016 menjadi media bagi delegasi dari negara kawasan Pasifik Selatan untuk menyuarakan isu pelanggaran HAM di Papua. Dalam sesi pleno 15 Maret, Barrett Salato, yang menjadi Ketua delegasi Kepulauan Solomon di sidang Dewan HAM PBB, menyampaikan beberapa isu HAM di Papua yang menjadi perhatian bukan saja Kepulauan Solomon, melainkan juga Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

Menurut Barrett, indikasi kuat adanya diskriminasi rasial yang terjadi pada Orang Asli Papua (OAP) di tanah mereka sendiri. Kepulauan Solomon dan negara-negara Melanesia, menurut Barrett Salato, juga prihatin dengan populasi OAP yang diperkirakan telah menjadi minoritas di Tanah Papua, sekitar 43 persen dari total populasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pada tanggal 24 September 2016, polemik mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua dan Papua Barat kembali dibahas pada sidang majelis umum PBB ke 71. Sekitar 7 negara di Kepulauan Pasifik meminta Dewan HAM PBB memulai penyelidikan yang kredibel dan independen terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Ketujuh negara tersebut adalah Republik Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Tonga, dan Palau.

Meskipun telah mendapat respon keras dari Diplomat Indonesia terhadap isu Papua, tidak juga meredam aktivitas yang dilakukan oleh para separatis Papua. Hal ini terbukti berbagai kasus gencatan senjata yang dilakukan masyarakat sipil di Papua, bahkan aksi protes yang dilakukan di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di negara-negara besar seperti Inggris dan Australia. Sehingga, berbagai macam cara dilakukan untuk mediasi gerakan para aktivis tersebut.

Kembali pada dinamika separatisme Papua, secara domestik telah mendapat perhatian oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini terbukti

melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan Otonomi Khusus di Papua. Namun, adanya beberapa spekulasi yang mengasumsikan tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur dan otonomi khusus yang jauh dari level berhasil. Permasalahan separatisme Papua yang cenderung dipolitisasi mengundang beragam opini bahwa bukan hanya faktor ekonomi yang menjadi pendorong, sehingga terlihat pada beberapa kejadian ketika maraknya pembangunan infrastruktur, para aktivis OPM juga melakukan banyak gencatan senjata dan penyerdaan masyarakat yang berdomisili di Papua.⁷

Bercermin pada usaha Indonesia dalam mempertahankan wilayah kedaulatan tentu membutuhkan strategi dalam konteks diplomasi pertahanan. Sasaran ini kemudian membutuhkan peran aktor-aktor diplomasi pertahanan, yakni Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menjaga kestabilan wilayah Indonesia. Tentu saja, kementerian dan lembaga lainnya memiliki andil besar dalam penyelesaian konflik ini. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya bertumpu pada kementerian Luar Negeri

⁷ Anonim, "Policy Miscalculations on Papua". *Institute for Policy Analysis of Conflict*, no.40, 2017

dalam konteks diplomasi namun juga mengandalkan peran dari Kementerian Pertahanan dalam konteks diplomasi pertahanan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan tehnik *Analysis Interactive Model* yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman. Tujuan dari metode ini adalah untuk menyatukan gagasan atau ide dengan fakta-fakta yang didapatkan selama penelitian.

Proses mengolah data untuk kemudian disajikan dalam bentuk hasil penelitian dilakukan dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*).⁸

Dalam penelitian ini, dibutuhkan landasan teori yang dapat menjadi kajian untuk menganalisa antara fenomena faktual dan teoretika dasar-dasar

⁸ Matthew. B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), hlm. 273.

perumusan analisa masalah yang dikaji tersebut. Penelitian ini dianalisa menggunakan teori separatisme, *Soft Power*, serta konsep diplomasi pertahanan.

Teori separatisme pada hakikatnya didefinisikan sebagai paham untuk memisahkan diri dari negara asal dan membentuk negara sendiri. Beberapa teori menyatakan bahwa daerah yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah cenderung agresif dalam memisahkan diri dibandingkan dengan daerah yang berpenghasilan lebih tinggi.

Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan oleh daerah miskin bahwa negaranya gagal dalam meningkatkan kemakmuran setiap wilayah. Pada teori separatisme, konklusi yang menjadi pemicu pemisahan diri terbagi menjadi beberapa bagian yakni, ekonomi, budaya, politik, serta faktor pendukung lainnya.

Teori separatisme dalam konteks eskalasi ancaman kemudian berkembang menjadi internasionalisasi, yang kemudian didefinisikan sebagai interaksi

atau keterkaitan antara dua atau lebih negara dalam cakupan global.⁹

Isu-isu internasionalisasi pada dasarnya merupakan perkembangan dari konflik perang dingin. Isu tersebut berkaitan erat dengan konflik etnis domestik dan kemudian mendapat intervensi dari negara atau pihak lain. Pada masa perang dingin, isu internasionalisasi banyak terjadi terutama di Uni Soviet. Para peneliti Uni Soviet kala itu tidak menyebut dengan istilah internasionalisasi melainkan dengan sebutan “*External Intervention in Internal Conflicts*”¹⁰

Teori lainnya yakni *Soft Power*, dimana salah satu tokoh penggagas *soft power* adalah Joseph Nye yang ia tulis dalam bukunya “*Soft Power: The Means to Success in World Politics*”. Nye menyatakan jika *soft power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menarik perhatian, membujuk, dan membuat orang lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita tanpa

⁹ Held, McGraw, at.al. “*Globalization/ Anti Globalization: Beyond the Great Divide*”, Second edition, (UK: Cambridge Press, 1999), hlm. 16.

¹⁰Najafov. Z., “Internationalization of Ethnic Conflicts and Impact on Regional and International Security”, *Journal of Political Sciences and Public Affairs*, 2017.

menggunakan paksaan/ kekerasan.¹¹ Dengan definisi tersebut, dapat disimpulkan jika *soft power* merupakan sebuah kekuatan yang konstruktif yang dapat digunakan dalam era globalisasi yang menuntut interkoneksi global.

Implementasi *Soft Power* berdasar pada paham realisme adalah bagaimana negara tersebut memandang *power* yang ada ketika berhadapan dengan negara lainnya.¹² Hal ini berlaku pada Indonesia dimana dalam mengimplementasikan *power* didasari oleh konsep *power* yang sudah ada untuk kemudian didukung oleh sumber daya dalam meningkatkan *soft power*.

- *Agent*, dalam hal ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam mengimplementasikan *soft power* seperti Pemerintah, masyarakat, hingga Organisasi Internasional.
- *Pillar*, dalam hal ini adalah dari aspek apa *soft power* bisa dimunculkan seperti kebijakan luar negeri, kebudayaan, bisnis,

pariwisata, ekonomi, dan bidang lainnya.

- *Instruments*, dalam hal ini adalah dalam bentuk produk apa *soft power* dapat diimplementasikan. Hal ini biasanya berupa *outcome* dari solusi selain militer seperti *foreign exchange*, konferensi, hingga diplomasi budaya.

Definisi konsep Diplomasi pertahanan pada dasarnya merupakan konsep yang menggambarkan strategi negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya mengenai keamanan dan pertahanan nasional. Di Eropa pada tahun 1998, melalui *Strategic Defence Review*, merupakan awal bagi kehadiran konsep diplomasi pertahanan baik dalam ruang lingkup politik internasional maupun militer.

Wolfgang menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam diplomasi pertahanan, diantaranya guna mereduksi potensi konflik antar negara (*conflict prevention*), membangun dan menjaga kepercayaan (*mutual understanding*), dan membantu

¹¹ Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, (New York: Public Affairs, 1992), hlm. 16

¹² J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, (New York: W.W. Norton, 2001), hlm. 56.

pengadaan alutsista suatu negara (*military assistance*).¹³

Disisi lain, Cottey dan Forster memaknai diplomasi pertahanan sebagai aktifitas yang tidak terlepas militer. Sehingga, Cottey dan Forster menawarkan *the new role of defence diplomacy* yang terangkum dalam *strategic engagement, promoting democratic civil-military relations, serta dengan cara developing peacekeeping capabilities*.¹⁴ Karena pada dasarnya, praktik diplomasi pertahanan menggunakan cara-cara damai sebagai interaksinya dalam perubahan lingkungan strategis dan tingkat kebutuhan dari negara tersebut.

Selain itu, konsep diplomasi pertahanan juga dikembangkan oleh Gregory Winger yang mengacu pada konteks *Power*. Menurut Winger, perluasan definisi diplomasi pertahanan patut dilakukan agar konsep militer dan

konsep pertahanan secara menyeluruh dapat disinergikan.¹⁵

Pada perkembangannya, militer juga menggunakan *soft approach* dengan prioritas diplomasi. Kemudian, yang juga menjadi faktor pendukung bahwa diplomasi pertahanan dilakukan melalui *soft approach* dan militerisasi yang dilakukan melalui kerjasama diperkuat oleh argumen yang dijelaskan oleh See Seng Tan dan Bhubindar Singh pada jurnal yang berjudul "*From Boots to Brogues: The Rise of Defense diplomacy in Southeast Asia*" menerangkan bahwa diplomasi pertahanan bersifat pragmatis dan transformatif.

Diplomasi pertahanan yang bersifat pragmatis adalah mengkoordinir situasi yang pada hakikatnya eksis diantara dua negara atau kawasan regional dan diplomasi pertahanan yang bersifat transformatif adalah mengubah secara substantif kondisi yang sudah ada. Menurut Tan dan Singh bahwa Asia mendukung mayoritas diplomasi pertahanan yang bersifat pragmatis karena pada dasarnya Asia mendukung

¹³ Wolfgang Waigner, "Parliamentary Control of Military Mission: Accounting for Pluralism", *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces*, 2006.

¹⁴ A. Cottey and Foster A, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles of Military Cooperation and Assistance*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 30.

¹⁵ Gregory Winger, "A Theory of Defense Diplomacy", *IWM Junior Visiting Fellows' Conferences*, Vol.33, 2014.

perdamaian yang sudah ada dan mengacu pada integritas regional.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilematika Internasionalisasi separatisme Papua yang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan belum mendapat perhatian khusus pada suatu waktu akan menunjukkan masa klimaks sebagai bentuk protes para aktivis untuk mempercepat proses kemerdekaan Papua. Jika ditinjau dari rentetan peristiwa gerakan separatisme Papua, baik secara domestik maupun internasional telah banyak kasus yang ditemukan. Hal ini secara tidak langsung membuat masyarakat Indonesia menjadi resah dan pada akhirnya kedaulatan Indonesia akan menjadi taruhannya.

Perjalanan bergejolaknya trauma Orang Asli Papua (OAP) terhadap Indonesia dimulai setelah adanya operasi Koteka yang dilakukan oleh TNI di Pegunungan Tengah pada tahun 1971-1974. Operasi tersebut dilakukan pada zaman Orde Baru oleh tentara Indonesia dengan tujuan untuk modernisasi masyarakat Papua. Berdasarkan fakta yang diklaim oleh Indonesia pada saat itu

¹⁶ Bhubhinder Singh, See Seng Tan, "From Boots to Brogues: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia", *RSIS Monograph*, No. 21, 2011.

modernisasi dilakukan dengan pemberian baju gratis kepada masyarakat Papua terutama yang berada di Pegunungan Tengah. Namun, fakta lain diberikan bahwa terjadi aksi anarkis yang dilakukan oleh TNI pada saat itu kepada setiap masyarakat Papua yang menolak untuk mengganti koteka dengan baju yang diberikan. "Tidak ada data resmi mengenai jumlah orang yang terbunuh, akan tetapi pada tahun 1981 mantan Gubernur Papua, Eliezener Bonay bersaksi di hadapan Pengadilan HAM Papua Barat bahwa jumlah kematian mencapai sekitar angka 3,000."¹⁷

Fenomena tersebut merupakan pukulan terberat dan meninggalkan trauma terutama dengan banyak korban jiwa OAP yang dibunuh oleh TNI. Puncak pemberontakan kaum separatis Papua terjadi pada saat kelompok KOTEKA ditawarkan Otonomi Khusus pada tahun 1999 sebagai solusi yang dapat menggantikan permintaan Papua merdeka. Namun, hal ini ditolak dan berimbas pada kebakaran yang

¹⁷ Allard K. Lowenstein, *Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control*. (Yale Law School: International Human Rights Clinic, 2008), hlm. 24.

dilakukan secara besar-besaran di sepanjang lingkaran Abepura.

Pihak militer mengklaim bahwa peristiwa ini dilakukan oleh kelompok KOTEKA dengan Benny Wenda sebagai pemimpinnya. Namun, hal sebaliknya diklaim oleh para aktivis serta saksi mata bahwa kebakaran tersebut dilakukan oleh pihak Polri.¹⁸ Hal ini berujung pada ditangkap dan diadilinya Benny Wenda pada 24 September 2002. Kemudian, Benny Wenda dimasukkan ke dalam Penjara Abepura karena telah melakukan tindakan provokasi terhadap masyarakat Papua. Namun, pada 27 Oktober 2002 Benny Wenda berhasil melarikan diri melalui perbatasan dan mengajukan perlindungan suaka di Inggris.

Polemik Perkembangan Isu Internasionalisasi Separatisme Papua

Keterlibatan negara-negara Pasifik Selatan dimulai sejak dimunculkannya isu pelanggaran HAM di Papua oleh para aktivis separatis yang kemudian semakin sering dibahas pada

forum-forum kawasan regional seperti MSG (Melanesian Spearhead Groups) dan PIF (Pacific Islands Forum). Partisipasi negara-negara Kawasan pasifik Selatan pada awalnya didasari oleh saling memiliki karena adanya persamaan ras yakni ras melanesia antara negara-negara kawasan Pasifik Selatan dengan Papua. Bermula dari ras dan perjalanan sejarah yang semakin menguatkan negara-negara tersebut untuk mendukung Papua agar merdeka dari Indonesia.

Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pada dasarnya Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia sejak direbut dari tangan Belanda. Awal mula dibentuk forum regional Melanesian Spearhead group adalah untuk mengembangkan perekonomian serta sharing budaya antara Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu. Namun, pada perkembangannya forum ini cenderung membahas tentang isu separatisme di Papua diperkuat dengan para aktivis separatis Papua yang mendatangi negara-negara Pasifik Selatan untuk mencari dukungan internasional dan

¹⁸ Ibrahim Peyon, "Perjalanan Benny Wenda: Rekayasa Serangan dan penjara Abepura (Bagian 2)", Suara Papua, 2018, dalam <http://suarapapua.com/2018/05/26/perjalanan-benny-wenda-rekayasa-serangan-dan-penjara-abepura-bagian-2/>. Diakses pada 27 Desember 2018.

salah satunya adalah dukungan negara-negara Pasifik Selatan.¹⁹

Sejalan Berkembangnya isu internasionalisasi separatisme Papua juga terjadi di Amerika Serikat. Berdasar dari sejarah, Amerika Serikat memiliki relasi yang sangat kuat dengan perjuangan Indonesia dalam merebut Irian Jaya, deklarasi PEPERA, hingga hubungan bilateral Indonesia- Amerika Serikat dalam kontrak kerjasama PT. Freeport yang berlokasi di Timika, Papua. Amerika memiliki peran penting sehubungan dengan kontribusinya dalam mewujudkan perjanjian New York untuk Papua. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi aktivis separatis untuk menggali dukungan dari negara adidaya tersebut. Para aktivis mendapat dukungan dari lembaga-lembaga non-pemerintah yang berada di AS, seperti organisasi kemanusiaan, agama, hingga komunitas minoritas.

Perjuangan yang dilakukan tercapai dengan terbentuknya ULMWP (*United Liberation Movement of West Papua*) serta dukungan politik

¹⁹ Anonim. "Diplomasi Indonesia Picu Perang Mulut Antara Fiji dan Kep.Salomon", dalam <https://www.dw.com/id/diplomasi-indonesia-picu-perang-mulut-antara-fiji-dan-kep-salomon/a-43097730>, diakses pada 26 Desember 2018.

internasional dari berbagai negara dengan diijinkan untuk membangun kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk Uni Eropa. Puncaknya, Benny Wenda bersama dengan simpatisan gerakan Separatisme Papua baik dalam lingkup internasional maupun domestik mengumpulkan tanda tangan sebagai petisi referendum. Hal ini merupakan produk nyata dari diselenggarakannya deklarasi *Westminster "Internationally Supervised Vote in West Papua"* yang diadakan di Parlemerter Inggris. Salah satu yang menjadi *highlight* adalah partisipasi negara-negara Kawasan Pasifik Selatan seperti Tonga, Vanuatu, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini untuk ikut menyuarakan kemerdekaan bagi Papua.²⁰

Hasil dari deklarasi tersebut adalah terkumpulnya 1,8 juta tanda tangan yang menyetujui Papua merdeka. Selanjutnya, petisi tersebut diserahkan kepada Dewan Dekolonisasi PBB sebagai persetujuan untuk dijadikan isu. Namun, hal ini mendapat penolakan baik oleh

²⁰ Ibrahim Peyon, "Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional: Lobi Internasional (Bagian 4)", Suara Papua, 2018, dalam <http://suarapapua.com/2018/06/02/perjalanan-benny-wenda-dari-penjara-abepura-ke-internasional-lobi-internasional-bagian-4-habis/>. Diakses pada 27 Desember 2018.

PBB dan Indonesia. Tidak berhenti pada keadaan tersebut, menyuarakan HAM Papua terus dilakukan oleh negara-negara Kawasan Pasifik Selatan berturut-turut setelah pengajuan tersebut hingga yang terakhir dilakukan pada tahun 2018 melalui negara Vanuatu.

Kembali pada politisasi isu internasionalisasi separatisme Papua, dukungan yang didapat oleh ULMWP tentu saja bukan hanya dalam bentuk persetujuan referendum ataupun dukungan moril. Para akademis Indonesia meneliti bahwa pemerintah Indonesia perlu untuk menganalisa lebih dalam pemilik dukungan finansial yang memfasilitasi para aktivis tersebut dalam melakukan aktivitasnya di luar negeri.

Perlu diketahui bahwa dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa partisipasi dari negara-negara kawasan Pasifik Selatan dimulai ketika isu separatisme Papua dijadikan sebagai salah satu objek politik internasional oleh organisasi regional negara-negara Kawasan Pasifik Selatan yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Indonesia dalam merespon forum yang diadakan oleh negara-negara Kawasan Pasifik Selatan mencoba untuk menjadi bagian

dari MSG dengan mengajukan diri sebagai anggota. Hal ini mendapat respon pro dan kontra dari negara-negara pasifik Selatan. Sebagian besar anggota bersikeras untuk tidak menetapkan Indonesia sebagai anggota karena dianggap sebagai penjajah Papua. Di sisi lain, Fiji yang menyatakan dukungan terhadap Indonesia berusaha menetapkan posisi Indonesia dengan menetapkan Indonesia sebagai status pemantau (Observer). Hal ini sebagai salah satu strategi Indonesia dalam meredam penyebaran isu separatisme di Papua agar tidak semakin lebar.²¹

Selain itu, Brigjen TNI Saptono Adji yang merupakan Deputi B Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI mengemukakan bahwa, “Dalam konteks negara-negara MSG kita menjadi *associate member*, kemudian disatu sisi kita tetap menggabungkan ULMWP, di PIF negara besar yang tergabung adalah Australia dan Selandia Baru, negara ini yang cukup dominan pada negara-negara MSG. Negara anggota MSG

²¹ Dateline Pacific. “Does Indonesia Belong in the Melanesian Spearhead Groups?”, dalam <https://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/2018637598/does-indonesia-belong-in-the-melanesian-spearhead-group>, diakses pada 26 Desember 2018.

sebagian yang menjadi anggota PIF.”²² Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia dalam mengumpulkan dukungan untuk menghentikan penyebaran isu separatisme Papua di negara-negara Kawasan Pasifik Selatan.

Di sisi lain, Australia menjadi salah satu negara yang memiliki kaitan sangat erat antara Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Perlu diketahui bahwa sebagian besar negara-negara Kawasan Pasifik Selatan membutuhkan Australia sebagai salah satu negara dengan kapasitas militer yang canggih serta berada pada teritori yang paling dekat dengan kawasan tersebut. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia pun makin erat dalam berbagai bidang. Terkait konteks isu pertahanan, Kementerian Pertahanan Indonesia sering melakukan pertemuan bilateral dengan Kementerian Pertahanan Australia setiap tahun dimulai pada tahun 2012.²³

²² Brigjen Saptono Adji, *“Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Papua”*, pada Focus Group Discussion Prodi Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, 31 Juli 2018.

²³ IKAHAN, *“Pertemuan Menteri Pertahanan Tahunan yang Perdana”*, dalam <http://ikahan.com/2012/10/pertemuan-menteri-pertahanan-tahunan-yang-perdana/>, diakses pada 20 Februari 2019.

Pertemuan tahunan antara MENHAN Indonesia dan MENHAN Australia adalah bentuk peningkatan kerjasama bilateral antar kedua negara tersebut dalam menghadapi ancaman yang mengancam teritori kedua negara tersebut. Bentuk kerjasama awal yang terbentuk adalah pada keamanan maritim, terorisme, serta peningkatan industri teknologi pertahanan. Pertemuan rutin ini kemudian berkembang pada isu pertahanan negara Indonesia, salah satunya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia terkait internasionalisasi separatisme Papua. Seperti yang terjadi pada tahun 2017, MENHAN Indonesia, Ryamizzard Ryacuddu menghadiri pertemuan bilateral tahunan dengan MENHAN Australia, Marise Paynes di Sidney, pada 16 Maret 2017.²⁴

Selain membahas tentang kerjasama maritim Indonesia dan Australia serta industri pertahanan, Indonesia juga menghimbau peran Australia dalam mengajak negara kawasan Pasifik Selatan untuk

²⁴ Bona Ventura, *“Ryamizard Ryacuddu Bertemu MENHAN Australia Bahas Pertahanan”*, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1189060/14/ryamizard-ryacudu-bertemu-menhan-australia-bahas-pertahanan-1489675510>, diakses pada 19 Februari 2019.

menghentikan pengangkatan isu Papua Merdeka serta mengakui kedaulatan Indonesia. Kerjasama ini juga kemudian dikembangkan melalui Kerjasama Kelompok Kerja Operasi Pemeliharaan Perdamaian periode tahun 2017-2020. Respon balik yang diberikan Australia tergambar pada kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia General Angus Campbell, AO, DSC., kepada Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacuddu di Kementerian Pertahanan pada 20 Februari 2019.²⁵ Pangab Australia menyatakan dukungan penuh mendukung kedaulatan Indonesia dan tidak akan ikut campur dalam masalah separatisme Papua. Disisi lain, Pangab Australia menyatakan peningkatan kerjasama antar angkatan bersenjata, terutama dengan adanya inisiasi pembangunan markas militer Australia di Papua Nugini.

Masih dalam konteks pertahanan, Indonesia saat ini lagi gencar-gencarnya memperkuat hubungan bilateral dengan Fiji. Hal ini terbukti melalui beberapa

²⁵ Kementerian Pertahanan Indonesia, "Diterima MENHAN RI, Pangab Australia Tegaskan Komitmen Bahwa Papua Bagian Tak Terpisahkan NKRI", dalam <https://www.kemhan.go.id/2019/02/20/diterima-menhan-ri-pangab-australia-tegaskan-komitmen-bahwa-papua-bagian-tak-terpisahkan-nkri.html>, diakses pada 21 Februari 2019.

kerjasama yang dibangun seperti pelatihan *peacekeeping operation*, hingga *exchanges of Naval officers*. Hal ini untuk memperkuat kerjasama pertahanan Indonesia dan Fiji yang sudah terbentuk sejak 1974 namun beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang signifikan.²⁶

Konsep internasionalisasi yang didasari oleh munculnya era globalisasi memicu para aktivis dalam penyebaran isu yang seharusnya menjadi persoalan domestik. Dukungan internasional yang diperoleh Benny Wenda dan aktivis separatist lainnya dilindungi oleh negara-negara kawasan Pasifik Selatan serta beberapa negara maju. Namun, Indonesia yang merupakan bagian dari aktivis HAM PBB sangat menghormati kedaulatan setiap negara dan kebijakan yang tercipta dalam hukum internasional.

Polemik internasionalisasi separatisme Papua menimbulkan dampak bukan hanya antara Indonesia dan Papua, melainkan juga dengan negara-negara yang mendukung

²⁶ Prashanth Parameswaran, "What's Next for Indonesia-Fiji Military Ties?", dalam <https://thediplomat.com/2018/08/whats-next-for-indonesia-fiji-military-ties/>, diakses pada 28 Desember 2018.

separatisme Papua. Vanuatu menyuarkan pelanggaran HAM di Papua melalui sidang PBB berakibat fatal terhadap hubungan Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik. Di sisi lain, Fiji saat ini mengemukakan dukungan penuh terhadap Indonesia sebagai hasil dari kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Fiji baik dalam bidang pendidikan, hingga kerjasama pertahanan.

Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Merespon Isu Internasionalisasi Separatisme Papua

Negara-negara Kawasan Pasifik Selatan memiliki kapabilitas militer belum bisa dibandingkan dengan yang dimiliki Indonesia. Sistem pertahanan di negara kawasan tersebut juga masih membutuhkan bantuan dari negara lain, baik dalam menunjang infrastruktur maupun kapasitas personel militer. Peran Australia yang selama ini menjadi dukungan utama bagi negara-negara kawasan Pasifik Selatan juga pada perkembangannya terancam dengan posisi China yang mulai memasuki negara-negara kawasan Pasifik Selatan.

Merupakan peran Indonesia untuk meningkatkan strategi diplomasi

pertahanan sebagaimana terkait dengan isu internasionalisasi separatisme Papua yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dilakukan melalui pendekatan *soft power* yang telah diterapkan oleh Gregory Winger berdasar pada konsep eskalasi ancaman yang tidak dapat dicari solusi melalui tindakan koersif.

1. Conflict Prevention dengan Kontra Internasionalisasi Separatisme Papua

Pendekatan *soft Power* yang selama ini dilakukan oleh Indonesia tampak nyata melalui pembangunan dalam mengimplementasikan program pemerintah, baik melalui kebijakan otonomi khusus dan Nawacita. Hal ini dapat ditolerir sehubungan dengan pendekatan yang dilakukan Indonesia belum mencapai dukungan penuh terhadap aspek-aspek lainnya diluar ekonomi dan infrastruktur.

Selain itu, implementasi kebijakan otonomi khusus yang menjadi instrumen dalam negeri untuk Papua perlu bimbingan lebih lanjut karena polemik yang ditimbulkan, salah satunya adalah menjadi pemicu naiknya keinginan

masyarakat Papua untuk merdeka. Kebijakan akan dinilai efektif jika semua sasaran terpenuhi dan dilakukan secara sinergis. Oleh karena itu, Otsus bukan hanya tentang pendanaan ataupun infrastruktur, melainkan juga pembangunan SDM OAP dalam bersaing dengan masyarakat lainnya.

2. *Strategic Engagement*

Disisi lain, pertahanan pada dasarnya adalah yang menjadi tujuan utama. Lolosnya Benny Wenda melalui perbatasan Indonesia-PNG menjadi perhatian bagi Indonesia dalam memahami bahwa penjagaan batas wilayah Indonesia perlu ditingkatkan serta sistem pertahanan menjadi lebih terpadu untuk mengawasi setiap gerak di wilayah perbatasan. Konteks diplomasi pertahanan yang ditawarkan oleh Cottey menjadi referensi yang kini diaplikasikan oleh TNI, seperti kerjasama pengiriman Atase Pertahanan ke beberapa negara kawasan Pasifik Selatan seperti yang terjadi di negara Fiji tahun 2018, latihan pasukan perdamaian oleh Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan seperti PNG dan Fiji, serta pertukaran Naval officers yang dinegosiasikan melalui KEMLU di Nauru.

Hal ini merupakan progress dari sistem pertahanan Indonesia yang mengedepankan kerjasama. Terutama jika dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sama dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Sehingga kerjasama pertahanan ini perlu ditingkatkan pada level yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) juga memicu adanya inisiasi dari pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan pada wilayah Papua dengan menambah jumlah personil militer di daerah tersebut. Sehingga, pertahanan Indonesia bisa mencakup baik setiap wilayah di Indonesia juga dalam hubungan pertahanan wilayah batas dengan negara lainnya. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia berdasar pada konsep diplomasi pertahanan dengan konteks meredam isu internasionalisasi separatisme Papua yakni:

- a. Menyelenggarakan Perjanjian Kerjasama Pertahanan secara Bilateral

Negara-negara kawasan Pasifik Selatan dengan cakupan wilayah yang didominasi oleh wilayah laut tidak

sebanding dengan sistem pertahanan laut yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Seperti contoh, Papua Nugini meskipun menjadi negara dengan wilayah terluas di antara negara-negara kawasan Pasifik Selatan lainnya masih didukung oleh kekuatan militer dari Australia, bukan hanya dalam konteks personil militer melainkan juga infrastruktur dan alutsista. Sehingga, pertahanan negara Papua Nugini dilakukan dengan mengacu pada sistem yang digunakan oleh Australia.

Sebaliknya, Indonesia dalam menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan mengutamakan diplomasi pertahanan secara pragmatis yakni dengan tetap mengacu pada sistem pertahanan yang telah dilakukan dan mendukung aspek-aspek yang masih memiliki kekurangan baik dalam penyediaan maupun dalam pelaksanaan.²⁷ Hubungan kerjasama pertahanan Indonesia yang terjalin dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan hingga saat ini masih didominasi dalam bentuk inisiasi. Namun, perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia

untuk dapat merealisasikan sebagaimana negara-negara kawasan Pasifik Selatan merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Papua dan memiliki sentimental terhadap isu Papua. Salah satunya, penguatan kerjasama penjagaan wilayah batas antara Indonesia dan Papua Nugini untuk mencegah keluar masuknya masyarakat secara ilegal, juga membatasi ruang gerak para separatis untuk mengakses negara Papua Nugini dalam penyebaran isu internasionalisasi separatisme Papua.

b. Penunjukkan Atase Pertahanan di Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan

Diplomasi setiap negara pada dasarnya dilakukan oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Pada konteks diplomasi pertahanan, Indonesia juga menerapkan sesuai dengan peran TNI yakni diplomasi melalui pengiriman atase pertahanan di setiap negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Peran atase pertahanan adalah mendukung pelaksanaan kerjasama pertahanan dengan negara-negara, bukan hanya dalam konteks personil, infrastruktur, ataupun alutsista melainkan juga melalui bentuk-bentuk

²⁷ Bhubhinder Singh, See Seng Tan, "From Boots to Brogues: The Rise of Defence Diplomacy in Southeast Asia", *RSIS Monograph*, No. 21, 2011, hlm. 12

kontribusi nyata dalam membantu negara tersebut dengan konflik yang dimiliki. Hal ini dilakukan sebatas hubungan kerjasama yang tejalin dengan tetap menghargai setiap negara tersebut.

Hingga saat ini, masih sedikit negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang didirikan pos atase pertahanan dari Indonesia. Seperti contoh penempatan Atase Pertahanan Indonesia untuk Papua Nugini yang juga merangkap untuk Kepulauan Salomon ditempatkan di Port Moresby, Papua Nugini. Selain itu, juga pada tahun 2017 didirikan pos atase pertahanan Indonesia untuk Fiji yang berada di Suva. Kerjasama atase pertahanan ini selain untuk mengawasi gerak dari para separatis juga untuk menjalin kerjasama pertahanan yang baik antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan.

c. Pertukaran Informasi dan Personil Militer serta Kunjungan Kapal Negara

Indonesia dalam prestasi pasukan perdamaian bukan hanya pada jumlah personil yang banyak, melainkan juga bentuk pengabdian serta solidaritas yang ditunjukkan. Hal ini yang kemudian

dapat menjadi strategi diplomasi pertahanan Indonesia dengan melakukan pertukaran informasi serta personil. Salah satu yang pernah menjadi inisiasi dari TNI adalah latihan personil yang dilakukan oleh pasukan perdamaian Indonesia dengan pasukan yang dimiliki oleh Papua Nugini dan Fiji. Hal ini dengan konsiderasi bahwa negara-negara tersebut memiliki potensi militer yang apabila dikembangkan dapat turut meningkatkan sistem pertahanan negara mereka. Selain itu, kapabilitas pasukan perdamaian yang dimiliki oleh Papua Nugini dan Fiji lumayan besar dibanding negara-negara kawasan Pasifik lainnya.

Selain itu, pertukaran personil militer dalam konteks pertahanan laut juga dilakukan seturut inisiasi yang dilakukan Indonesia melalui Pacific Islands Forum (PIF). Pertukaran personil militer laut akan dilakukan demi menjaga stabilitas wilayah Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik yang merupakan negara-negara kepulauan. Inisiasi ini tentunya jika dikembangkan akan menjadi pemicu bagi negara-negara kawasan Pasifik Selatan lainnya untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan regional negara tersebut. Hal ini kemudian mengacu pada

implementasi kebijakan Indonesia dalam meredam aksi yang dilakukan negara-negara kawasan Pasifik Selatan terkait isu internasionalisasi separatisme Papua.

Disisi lain, Indonesia melakukan peningkatan kerjasama terhadap Australia selain sebagai kekuatan hubungan bilateral, juga sebagai media untuk mendekati negara-negara yang frontal terhadap isu separatisme Papua seperti Vanuatu. Kerjasama ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama angkatan perang bersenjata antara Indonesia dan Australia yang diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Australia kepada MENHAN Indonesia. Perlu diketahui bahwa Australia menyediakan pasukan militer kepada beberapa negara kawasan Pasifik Selatan, salah satunya adalah Papua Nugini. Hal ini juga bisa dilakukan pendekatan terhadap Vanuatu dan negara-negara kawasan Pasifik Selatan lainnya.

KESIMPULAN

1. Perkembangan polemik Isu Internasionalisasi Separatisme Papua dapat dianalisa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut: a. Menangani penyelesaian polemik isu internasionalisasi separatisme Papua dengan menerapkan diplomasi total bukan hanya berdasar pada diplomasi formal melainkan melakukan pendekatan ke dalam berbagai aspek yang cenderung ke arah non-formal; b. Melakukan dialog dengan para aktivis separatis Papua untuk menemukan solusi atau penyelesaian permasalahan Papua yang memberikan jalan tengah baik bagi Indonesia dan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan dapat dicapai dengan hal-hal sebagai berikut: a. Perlu dibangun kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan yang lebih baik sehingga kepentingan setiap negara dapat terpenuhi dan; b. Bentuk-bentuk implementasi kerjasama sebagai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia perlu untuk dikembangkan sehingga kedaulatan negara yang menjadi tujuan dapat tercapai.

REKOMENDASI

- a. konsep kedaulatan perlu untuk dibangun kembali kepada setiap masyarakat Papua.
- b. Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional perlu untuk mengklasifikasikan setiap isu atau ancaman sehingga solusi yang didapat sesuai objek dan tepat sasaran.
- c. Implementasi soft power oleh pemerintah Indonesia pada negara-negara kawasan Pasifik Selatan perlu untuk dilebarkan ke dalam aspek yang memiliki potensi kerjasama yang menguntungkan.
- d. Kerjasama pertahanan berbasis pada konsep diplomasi pertahanan perlu dilakukan untuk menghindari pemicu munculnya ancaman tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahar, Saafroedin. 1996. *Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thomson, Janice E. 1995. *State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap Between Theory and Empirical Research*. USA: Wiley.
- Syamsudin, Nazarudin. 1989. *Integrasi politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mearsheimer, J. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton.
- Nye, Joseph. 1992. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- McGraw, Held, at.al. 1999. *Globalization/Anti Globalization: Beyond the Great Divide*. UK: Cambridge Press.
- Miles, Matthew B., Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Cottey A., and Foster A. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles of Military Cooperation and Assistance*. Oxford: Oxford University Press.

Jurnal

- Anonim. 2017. "Policy Miscalculations on Papua". *Institute for Policy Analysis of Conflict* No.40.
- Najafov. Z. 2017. "Internationalization of Ethnic Conflicts and Impact on Regional and International Security". *Journal of Political Sciences and Public Affairs*.
- Wagner, Wolfgang. 2006. "Parliamentary Control of Military Mission: Accounting for Pluralism". *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces*.
- Winger, Gregory. 2014. "A Theory of Defense Diplomacy". *The Velvet Gauntlet*.
- Singh, Bhuhindar, See Seng Tan. 2011. "From Boots to Brogues: The Rise of Defence Diplomacy in

- Southeast Asia". RSIS Monograph No. 21.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Lowenstein, Allard K. 2008. "Indonesian Human Right Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control. *Yale Law School: International Human Rights Clinic*.
- Website**
- Anonim. "Diplomasi Indonesia Picu Perang Mulut Antara Fiji dan Kep.Salomon", dalam <https://www.dw.com/id/diplomasi-indonesia-picu-perang-mulut-antara-fiji-dan-kep-salomon/a-43097730>, diakses pada 26 Desember 2018.
- Peyon, Ibrahim. "Perjalanan Benny Wenda: Rekayasa Serangan dan penjara Abepura (Bagian 2)", *Suara Papua*, dalam <http://suarapapua.com/2018/05/26/perjalanan-benny-wenda-rekayasa-serangan-dan-penjara-abepura-bagian-2/>. Diakses pada 27 Desember 2018.
- _____, "Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional: Lobi Internasional (Bagian 4)", *Suara Papua*, 2018, dalam <http://suarapapua.com/2018/06/02/perjalanan-benny-wenda-dari-penjara-abepura-ke-internasional-lobi-internasional-bagian-4-habis/>. Diakses pada 27 Desember 2018.
- Pacific, Dateline. "Does Indonesia Belong in the Melanesian Spearhead Groups?", dalam <https://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/2018637598/does-indonesia-belong-in-the-melanesian-spearhead-group>, diakses pada 26 Desember 2018
- Parameswaran, Prashanth, "What's Next for Indonesia-Fiji Military Ties?", dalam <https://thedi diplomat.com/2018/08/whats-next-for-indonesia-fiji-military-ties/>, diakses pada 28 Desember 2018.
- Sophie, Foster, and Francis James West. "Pacific Islands", dalam <https://www.britannica.com/place/Pacific-Islands>, diakses pada 26 Desember 2018.
- IKAHAN, "Pertemuan Menteri Pertahanan Tahunan yang Perdana", dalam <http://ikahan.com/2012/10/pertemuan-menteri-pertahanan-tahunan-yang-perdana/>, diakses pada 20 Februari 2019.
- Ventura, Bona, "Ryamizard Ryacuddu Bertemu MENHAN Australia Bahas Pertahanan", dalam <https://nasional.sindonews.com/read/1189060/14/ryamizard-ryacudu-bertemu-menhan-australia-bahas-pertahanan-1489675510>, diakses pada 19 Februari 2019.
- Kementerian Pertahanan Indonesia, "Diterima MENHAN RI, Pangab Australia Tegaskan Komitmen Bahwa Papua Bagian Tak Terpisahkan NKRI", dalam <https://www.kemhan.go.id/2019/02/20/diterima-menhan-ri-pangab-australia-tegaskan-komitmen-bahwa-papua-bagian-tak-terpisahkan-nkri.html>, diakses pada 21 Februari 2019.